

PENILAIAN ATAS SISTEM PEMILU SERENTAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI

Aulia Nurul Faika¹, Intan Meilany², Tiara Nivia Ananta³, Rudi Santoso⁴
aulianurulfaika01@gmail.com¹, intanmailani16@gmail.com², tiaranvia7@gmail.com³,
rudisantoso@radenintan.ac.id⁴
UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai efektivitas sistem pemilu serentak dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu serentak merupakan inovasi dalam sistem politik yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, memperkuat sistem presidensial, serta mendorong stabilitas politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan memperkuat legitimasi pemerintahan, serta berkontribusi terhadap stabilitas politik. Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas teknis penyelenggaraan, tingginya beban kerja penyelenggara, serta potensi menurunnya kualitas pilihan pemilih akibat banyaknya pilihan dalam satu waktu. Selain itu, peningkatan partisipasi politik belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Kualitas Demokrasi, Partisipasi Politik, Sistem Presidensial, Stabilitas Politik.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara melalui mekanisme yang sah dan konstitusional.¹ Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi tersebut adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, dan berintegritas menjadi hal yang sangat penting.²

Dalam konteks Indonesia, sistem pemilu terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika politik dan tuntutan reformasi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem pemilu serentak, yaitu pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu yang bersamaan. Kebijakan ini mulai diterapkan sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial, mengurangi fragmentasi politik, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pemilu serentak juga diharapkan

¹ Putri Ayu Nabila et al., "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Memerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga," *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024).

² Anak Agung et al., "Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal," *JURNAL BAPPEDA LITBANG* 2, no. April (2019): 1–10.

mampu mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.

Namun demikian, implementasi sistem pemilu serentak tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Kompleksitas teknis dalam penyelenggaraan, beban kerja yang tinggi bagi penyelenggara, serta potensi kebingungan di kalangan pemilih menjadi beberapa isu yang sering muncul. Di samping itu, muncul pula pertanyaan mengenai sejauh mana sistem ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas demokrasi, baik dari segi partisipasi politik, representasi rakyat, maupun akuntabilitas pemerintahan.³

Kualitas demokrasi sendiri tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara rutin, tetapi juga dari sejauh mana pemilu tersebut mampu menghasilkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian yang komprehensif terhadap sistem pemilu serentak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efektivitas pelaksanaan, tingkat partisipasi pemilih, kualitas hasil pemilu, serta dampaknya terhadap stabilitas politik.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pemilu serentak dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan melakukan penilaian yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ini, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem pemilu di masa yang akan datang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan sistem pemilu serentak serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif berdasarkan data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder.⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi lembaga terkait pemilu.⁶ Selain itu, dokumen-dokumen yang relevan dengan pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia juga dijadikan sebagai bahan analisis untuk memperkuat kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengkaji, dan mengolah berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem pemilu serentak dan kualitas demokrasi.⁷ Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian

³ H Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Qalamuna* 11, no. 2 (2019): 89–110.

⁴ Aip Syarifudin, "Pilkada Dan Fenomena Politik Uang; Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2020): 25–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>.

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

⁶ John W Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 21.

⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 81.

data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara sistem pemilu serentak dan kualitas demokrasi.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian kritis terhadap setiap sumber yang digunakan agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.⁸

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang objektif dan mendalam mengenai efektivitas sistem pemilu serentak dalam meningkatkan kualitas demokrasi, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian di bidang politik dan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem pemilu serentak di Indonesia menunjukkan berbagai dinamika yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Berdasarkan hasil kajian, sistem ini memberikan dampak yang cukup kompleks, baik dalam aspek positif maupun tantangan yang muncul selama pelaksanaannya.⁹

Dari segi efisiensi penyelenggaraan, pemilu serentak dinilai mampu mengurangi frekuensi pelaksanaan pemilu yang sebelumnya dilakukan secara terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini berdampak pada penghematan anggaran negara serta efisiensi waktu. Selain itu, penyatuan jadwal pemilu juga berkontribusi pada pengurangan potensi konflik politik yang berkepanjangan akibat kontestasi yang terus-menerus. Dengan demikian, stabilitas politik relatif lebih terjaga karena proses politik tidak berlangsung secara berulang dalam waktu yang berdekatan.¹⁰

Dalam aspek penguatan sistem presidensial, pemilu serentak dinilai mampu mendorong terciptanya keselarasan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini terjadi karena pemilih cenderung mempertimbangkan pilihan secara simultan antara calon presiden dan partai politik, sehingga memungkinkan terbentuknya dukungan politik yang lebih solid di parlemen. Dampak positifnya adalah meningkatnya efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program kerja tanpa mengalami hambatan politik yang signifikan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak menghadirkan tantangan serius, terutama dalam hal kompleksitas teknis penyelenggaraan. Banyaknya jenis surat suara yang harus dipilih dalam satu waktu menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih, khususnya bagi pemilih dengan tingkat literasi politik yang rendah. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pilihan politik masyarakat karena keputusan yang diambil tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Selain itu, beban kerja penyelenggara pemilu meningkat secara signifikan. Dalam praktiknya, pemilu serentak menuntut kesiapan logistik, sumber daya manusia, serta manajemen yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilu yang dilakukan secara terpisah. Beberapa kasus menunjukkan adanya kelelahan ekstrem pada petugas pemilu

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 12.

⁹ Emy Hajar Abra, "Pemilu Serentak Di Indonesia (Antara Original Intent Dan Implementasi)," *Jurnal Bawaslu* 1, no. 1 (2019): 34–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.223>.

¹⁰ Ibid.

yang bahkan berdampak pada kesehatan mereka. Hal ini menjadi catatan penting dalam menilai efektivitas sistem ini dari perspektif kemanusiaan dan keberlanjutan penyelenggaraan.¹¹

Dari sisi partisipasi politik, pemilu serentak menunjukkan hasil yang relatif positif dengan tingkat partisipasi pemilih yang cenderung stabil bahkan meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingginya perhatian publik terhadap momentum pemilu yang dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi, peningkatan partisipasi ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas partisipasi. Banyak pemilih yang masih bersikap pragmatis dan belum sepenuhnya memahami profil maupun program calon yang dipilih.

Dalam konteks kualitas demokrasi, pemilu serentak memberikan kontribusi dalam memperkuat legitimasi pemerintahan karena pemimpin yang terpilih memiliki dukungan langsung dari rakyat dalam satu momentum yang sama. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh legitimasi formal, melainkan juga oleh kualitas representasi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, masih ditemukan tantangan seperti praktik politik uang, polarisasi politik, serta dominasi elit tertentu yang dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang substantif.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemilu serentak sangat bergantung pada kesiapan berbagai aspek pendukung, seperti pendidikan politik masyarakat, profesionalitas penyelenggara pemilu, serta regulasi yang jelas dan adaptif. Tanpa adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, pemilu serentak berpotensi hanya menjadi perubahan prosedural tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu serentak memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dari segi efisiensi dan stabilitas politik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal, diperlukan evaluasi berkelanjutan serta perbaikan dalam pelaksanaan agar berbagai kelemahan yang ada dapat diminimalkan. Upaya ini penting agar demokrasi tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, sistem pemilu serentak merupakan salah satu upaya strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Penerapan sistem ini terbukti memberikan sejumlah dampak positif, antara lain meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, memperkuat sistem presidensial, serta mendorong stabilitas politik melalui penyederhanaan tahapan kontestasi politik. Selain itu, pemilu serentak juga berkontribusi dalam memperkuat legitimasi pemerintahan karena dilaksanakan dalam satu momentum yang sama.

Namun demikian, sistem pemilu serentak juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kompleksitas teknis dalam pelaksanaan, tingginya beban kerja penyelenggara, serta potensi kebingungan di kalangan pemilih menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas sistem ini. Di samping itu, peningkatan partisipasi

¹¹ Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Beserta Penjelasannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2017).

¹² Agung et al., "Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal."

pemilih belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas partisipasi politik, sehingga masih terdapat praktik-praktik yang dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu serentak memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukung, seperti pendidikan politik masyarakat, profesionalitas penyelenggara, serta perbaikan regulasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan sistem pemilu serentak perlu terus dilakukan agar tujuan mewujudkan demokrasi yang berkualitas, efektif, dan berintegritas dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abra, Emy Hajar. "Pemilu Serentak Di Indonesia (Antara Original Intent Dan Implementasi)." *Jurnal Bawaslu* 1, no. 1 (2019): 34–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.223>.
- Agung, Anak, Ngurah Agung, Wira Bima, and Universitas Mahendradatta. "Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal." *JURNAL BAPPEDA LITBANG* 2, no. April (2019): 1–10.
- Grasindo, Tim. *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Beserta Penjelasannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2017.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- John W Creswell. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kadenun, H. "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Qalamuna* 11, no. 2 (2019): 89–110.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nabila, Putri Ayu, Padilatul Ilmi Nst, S Intan, Siti Fatimah, Bambang Trisno, Alamat Jl, Gurun Aua, Kubang Putih, and Kec Banuhampu. "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Memerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga." *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024).
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syarifudin, Aip. "Pilkada Dan Fenomena Politik Uang; Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2020): 25–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>.